

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER- 08 /PB/2009

TENTANG  
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diperlukan Bagan Akun Standar yang lengkap dan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (pelaporan) seluruh transaksi keuangan yang terjadi pada Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar dinyatakan bahwa Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN BAGAN AKUN STANDAR.

Pasal 1

- (1) Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar ini digunakan sebagai pedoman oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Ruang Lingkup penambahan dan perubahan Bagan Akun Standar ini meliputi penambahan kode akun/mata anggaran, perubahan kode akun/mata anggaran dan penjelasan, dan kode akun yang tidak digunakan lagi.



Pasal 2

Penambahan dan perubahan kode akun/mata anggaran dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini terdiri dari:

- a. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. penambahan dan/atau perubahan penjelasan kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- d. perubahan Kodifikasi maupun Uraian kode akun/mata anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. perubahan Kodifikasi maupun Uraian Akun Neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. kode akun/mata anggaran yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

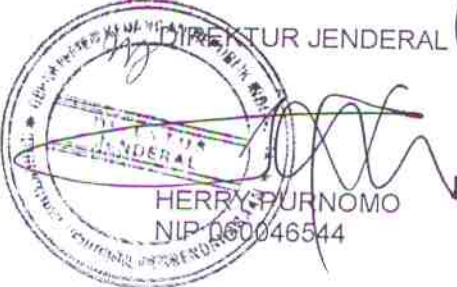
Pasal 3

Bagan Akun Standar yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2009

  
HERRY PURNOMO  
NIP. 060046544

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007  
 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2008**

KODE	URAIAN AKUN
<b>AKUN NERACA</b>	
<b>AKUN ASET</b>	
<b>1113</b>	<b>Rekening Pemerintah Lainnya</b>
11132	Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum
111325	Rekening Pemerintah di Bank Umum dalam Rangka Penempatan
<b>1131</b>	<b>Piutang Pajak</b>
11318	Piutang Cukai lainnya
113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar
<b>1136</b>	<b>Uang muka belanja</b>
11363	Belanja Dibayar dimuka
113631	Belanja pegawai yang dibayar dimuka
113632	Belanja barang yang dibayar dimuka
113633	Belanja pembayaran bunga yang dibayar dimuka
<b>1332</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>
<b>1333</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
<b>1334</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya</b>
<b>1531</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>
<b>15315</b>	<b>Software</b>
153151	Software
<b>15316</b>	<b>Lisensi</b>
153161	Lisensi
<b>15317</b>	<b>Hasil Kajian/Penelitian</b>
153171	Hasil Kajian/Penelitian
<b>AKUN KEWAJIBAN</b>	
<b>2113</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan</b>
<b>21131</b>	<b>Utang Kelebihan Pembayaran Pajak</b>
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea keluar
<b>2212</b>	<b>Utang Jangka Panjang</b>
<b>22124</b>	<b>Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN</b>
221241	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN

KODE	URAIAN AKUN
<b>AKUN PENDAPATAN</b>	
<b>4116</b>	<b>Pendapatan Pajak Lainnya</b>
41161	Pendapatan Pajak Lainnya
411613	Pendapatan Pajak Penjualan (PPn) Batubara
<b>4121</b>	<b>Pendapatan Bea Masuk</b>
41211	Pendapatan Bea Masuk
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya di dalam daerah pabean (antar pulau)
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (Transaksi Non Kas)
<b>4122</b>	<b>Pendapatan Bea Keluar</b>
41221	Pendapatan Bea Keluar
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar
<b>4214</b>	<b>Pendapatan Kehutanan</b>
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar kegiatan Kehutanan
<b>4232</b>	<b>Pendapatan Jasa</b>
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (Treasury Single Account )
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
423254	Pendapatan dari Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia
<b>4234</b>	<b>Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan</b>
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi
<b>4236</b>	<b>Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi</b>
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
<b>4237</b>	<b>Pendapatan Iuran dan Denda</b>
42375	Pendapatan Denda
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan TSA

KODE	URAIAN AKUN
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling
<b>4249</b>	<b>Pendapatan BLU Lainnya</b>
42491	Pendapatan BLU Lainnya
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU
<b>AKUN BELANJA</b>	
<b>5112</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri</b>
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/Polri
511245	Belanja Tunjangan Cacat dan Santunan TNI/Polri
<b>5113</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara</b>
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Pejabat Negara
<b>5115</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS</b>
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS
<b>5135</b>	<b>Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI</b>
51351	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
513511	Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI
<b>551</b>	<b>Belanja Subsidi Perusahaan Negara</b>
<b>5513</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan – Non BBM</b>
55134	Belanja Subsidi Minyak Goreng
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng
<b>552</b>	<b>Belanja Subsidi Perusahaan Swasta</b>
<b>5521</b>	<b>Belanja Subsidi Lembaga Keuangan</b>
55213	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
<b>5811</b>	<b>Belanja Lain-Lain</b>
58114	Belanja Lain-Lain III
581143	Belanja Pengembalian Penerimaan Hibah karena Pengeluaran Ineligible
581144	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM

KODE	URAIAN AKUN
581145	Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah
<b>AKUN TRANSFER KE DAERAH</b>	
<b>6221</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian</b>
62211	<b>Transfer Dana Penyesuaian</b>
622113	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Propinsi Penghasil
622114	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil
622115	Transfer Dana Penyesuaian alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Kabupaten/Kota Daerah Lainnya
622116	Transfer Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana
<b>AKUN PEMBIAYAAN</b>	
<b>7113</b>	<b>Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi</b>
71131	<b>Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi</b>
711313	Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)
<b>7224</b>	<b>Pengembalian Pinjaman</b>
72241	<b>Pengembalian Pinjaman Ineligible</b>
722411	Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible
<b>7241</b>	<b>Penyertaan Modal Negara</b>
72411	<b>Penyertaan Modal Negara pada BUMN</b>
724112	Dana Investasi Pemerintah untuk Restrukturisasi BUMN
<b>AKUN NON ANGGARAN</b>	
<b>8111</b>	<b>Penerimaan PFK 10% Gaji</b>
81112	<b>Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI</b>
811121	Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PT KAI
811122	Penerimaan Setoran PT KAI-luran Pegawai PSL
811123	Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
<b>8145</b>	<b>Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan</b>
81451	Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rekening 502.000000

KODE	URAIAN AKUN
814511	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
814512	Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
<b>8211</b>	<b>Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji</b>
<b>82112</b>	<b>Penerimaan Setoran PFK Eks PNS PT KAI</b>
821121	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PT KAI
821122	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Iuran Pegawai PSL
821123	Pengembalian Penerimaan Setoran PT KAI-Kontribusi PT KAI
<b>8245</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan</b>
<b>82451</b>	<b>Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan dari Rekening 502.000000</b>
824511	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening 502.000000 ke Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan
824512	Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan ke Rekening 502.000000
<b>8251</b>	<b>Pengeluaran Transito</b>
<b>82511</b>	<b>Pengeluaran Transito</b>
825114	Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP Tahun Anggaran Yang Lalu

**PENAMBAHAN KODE AKUN PADA PMK.91/PMK.05/2007  
 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR YANG BERLAKU SEJAK TAHUN 2009**

KODE	URAIAN AKUN
<b>AKUN PENDAPATAN</b>	
<b>4113</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
<b>41131</b>	<b>Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan</b>
411316	Pendapatan PBB Migas
<b>4237</b>	<b>Pendapatan Iuran dan Denda</b>
<b>42375</b>	<b>Pendapatan Denda I</b>
423759	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan penerimaan Negara oleh Bank/Pos persepsi
<b>42376</b>	<b>Pendapatan Denda II</b>
423761	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pelimpahan Saldo BO II ke BO I
423762	Pendapatan Denda atas kekurangan/keterlambatan pembagian PBB/BPHTB oleh BO III PBB/BPHTB
<b>42326</b>	<b>Pendapatan Jasa Kepolisian</b>
423261	Pendapatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
423265	Pendapatan tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( TNKB)
423266	Pendapatan Klinik Pengemudi (KLIPENG)
423267	Pendapatan Senjata Api ( SENPI)
<b>4311</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri</b>
<b>43112</b>	<b>Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas</b>
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Kas)
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)
<b>4312</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri</b>
<b>43122</b>	<b>Pendapatan Hibah Luar Negeri Non Kas</b>
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Barang (Transaksi Non Kas)
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Berupa Jasa (Transaksi Non Kas)
<b>AKUN BELANJA</b>	
<b>5131</b>	<b>Belanja Pensiun dan Uang Tunggu</b>
<b>51314</b>	<b>Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP</b>
513141	Belanja Tunjangan/Dana Kehormatan Veteran RI



